

Analisis Manajemen BPBD Dalam Mitigasi Bencana Di Kabupaten Tulungagung

Wulan Krisna Pratiwi¹⁾, Deby Satyo Rusandy²⁾

¹ Kabupaten Tulungagung

²Magister Manajemen, Universitas Islam Kadiri

email: wulanxsan@gmail.com¹

Abstract

This study aims to analyze the management of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Tulungagung Regency in disaster mitigation using the POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) management function approach. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and literature review. The results show that BPBD planning has been prepared based on national regulations and local conditions through contingency plan documents and the Disaster Resilient Village program. In terms of organization, BPBD established an Operations Control Center (Pusdalops) and established cross-agency coordination, although volunteer management and stakeholder awareness still need to be improved. The implementation of the mitigation program is carried out through training, simulations, and emergency response involving the community, but is still hampered by limited resources and routine training. Supervision is carried out through regular evaluations of program effectiveness and community satisfaction, but is not yet fully participatory. Overall, the management of BPBD Tulungagung is considered quite effective in implementing the POAC function, although there is still a need for improved coordination, ongoing training, and a participatory evaluation system to strengthen regional preparedness in facing potential disasters.

Keywords: Disaster Management, BPBD, Disaster Mitigation, POAC

A. Latar Belakang Teoritis

Bencana merupakan fenomena alam maupun buatan manusia yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara materiil maupun nonmateriil (BNPB, 2023). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis, geologis, dan klimatologis yang kompleks memiliki risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan. Kabupaten Tulungagung, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, juga tidak luput dari risiko bencana tersebut. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang dilintasi oleh beberapa sungai besar dan topografi yang bervariasi dari dataran rendah hingga pegunungan. Bencana di daerah ini tidak hanya terbatas pada banjir, tetapi juga mencakup tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, dan bencana lainnya (Sari et al., 2021).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai garda terdepan dalam menangani situasi darurat, baik pada tahap prabencana, saat bencana, maupun pascabencana (BNPB, 2023). Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008, BPBD memiliki tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan penanganan bencana di tingkat daerah. BPBD membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, tanggap, dan terlatih. Manajemen SDM yang efektif dan profesional menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan peran strategis ini (Robbins & Judge, 2018).

Menurut Robbins dan Judge (2018), efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi SDM yang dimiliki serta kemampuan dalam menjalankan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Planning, Organizing, Actuating, Controlling atau POAC). POAC merupakan kerangka kerja manajerial yang menjadi acuan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks BPBD, penerapan POAC mencakup perencanaan mitigasi bencana, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan tindakan darurat, serta pengawasan terhadap efektivitas respons bencana.

Perencanaan (*Planning*) merupakan tahap awal dalam pengelolaan bencana yang melibatkan identifikasi risiko, penyusunan rencana kontingensi, dan pengembangan prosedur standar operasional (SOP) (Mathis & Jackson, 2019). BPBD Tulungagung perlu memastikan bahwa seluruh komponen perencanaan telah disusun secara komprehensif agar respons bencana dapat berjalan dengan baik. Pengorganisasian (*Organizing*), BPBD perlu mengkoordinasikan berbagai pemangku

kepentingan, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan organisasi nonpemerintah, untuk mencapai sinergi dalam penanggulangan bencana.

Tahap pelaksanaan (*Actuating*) merupakan fase implementasi rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, kemampuan SDM BPBD dalam menggerakkan sumber daya manusia dan material menjadi faktor penting dalam efektivitas respons bencana (Mathis & Jackson, 2019). Selain itu, pelaksanaan tanggap darurat juga membutuhkan koordinasi yang baik antarinstansi serta pengelolaan informasi yang cepat dan akurat. Sementara itu, tahap pengawasan (*Controlling*) bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas program penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini penting guna memastikan bahwa seluruh kegiatan sudah sesuai dengan prosedur dan mencapai hasil yang diharapkan (Sari et al., 2021).

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa BPBD di berbagai daerah menghadapi tantangan besar dalam aspek manajemen dan koordinasi. Menurut Sari et al. (2021), kendala yang sering muncul meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang tidak optimal, serta rendahnya kapasitas SDM dalam menghadapi kondisi darurat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan simulasi bencana menjadi hal yang sangat penting.

Keberhasilan penanggulangan bencana juga bergantung pada kolaborasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2019), manajemen SDM yang efektif tidak hanya mencakup perekrutan dan pelatihan, tetapi juga pengembangan keterampilan kepemimpinan dan penguatan motivasi kerja. Dalam konteks BPBD Tulungagung, pemberdayaan SDM melalui pelatihan tanggap bencana dan simulasi kondisi darurat akan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai skenario bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan pendekatan POAC sebagai kerangka analisis. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat manajemen bencana di tingkat daerah serta meningkatkan efektivitas kinerja BPBD dalam merespons bencana secara komprehensif.

Konsep POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*)

Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses dasar dalam manajemen yang bertujuan menentukan arah kegiatan serta merancang langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Menurut Terry (2019), perencanaan adalah proses pemikiran awal dalam menetapkan tujuan serta strategi pencapaiannya. Dalam praktiknya, perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, perancangan program, dan pengambilan keputusan secara bijak. Langkah-langkah perencanaan meliputi penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, identifikasi peluang dan hambatan yang mungkin muncul, perumusan strategi untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, serta antisipasi risiko dengan menyiapkan rencana alternatif. Perencanaan yang matang akan menghasilkan langkah-langkah terstruktur sehingga dapat meminimalkan risiko kegagalan dalam implementasi kegiatan organisasi.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan tahap di mana sumber daya dikelola secara terstruktur agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien. Menurut Terry (2019), pengorganisasian bertujuan menciptakan struktur kerja yang jelas sehingga setiap anggota organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya. Proses ini melibatkan pembagian tugas berdasarkan keahlian dan kompetensi, pembentukan tim kerja dengan peran yang terdefinisi, pengaturan koordinasi antarbagian untuk mencegah tumpang tindih kegiatan, serta pengelolaan sumber daya manusia melalui pembagian kerja yang rasional. Dengan pengorganisasian yang baik, proses kerja akan lebih terkoordinasi dan produktivitas organisasi dapat meningkat.

Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan tahap menggerakkan sumber daya manusia agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Terry (2019), tahap ini memerlukan keterampilan kepemimpinan yang kuat agar anggota tim dapat bekerja secara optimal dan termotivasi dalam mencapai target. Pelaksanaan mencakup pemberian instruksi yang jelas dan mudah dipahami, arahan serta bimbingan untuk menjaga kualitas kerja, penguatan motivasi melalui pendekatan persuasif dan pemberian apresiasi, serta pembangunan komunikasi yang efektif guna menciptakan keselarasan tindakan. Pelaksanaan yang efektif akan menghasilkan output sesuai dengan perencanaan sekaligus membentuk lingkungan kerja yang dinamis dan produktif.

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan tahapan akhir dalam POAC yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan penyimpangan, manajer harus segera mengambil tindakan korektif agar tujuan tetap tercapai. Proses pengawasan meliputi penetapan standar kinerja yang jelas, pemantauan hasil kerja secara periodik, evaluasi terhadap pencapaian tujuan, serta pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Pengawasan yang efektif memastikan keberlanjutan proses manajerial sekaligus mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

Penanggulangan Bencana oleh BPBD Kabupaten Tulungagung

Salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Tulungagung melibatkan berbagai jenis bencana alam, seperti tanah longsor, gempa bumi, dan angin puting beliung. Penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung melibatkan peran aktif BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penanganan bencana secara komprehensif. BPBD menghadapi tantangan besar dalam merancang dan melaksanakan strategi mitigasi serta kesiapsiagaan bencana, mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar (Setyawan, 2015).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD berfungsi sebagai lembaga yang mengoordinasikan penanggulangan bencana di daerah. Tugas utama BPBD mencakup mitigasi, penanggulangan, dan pemulihan pasca-bencana. Fokus utama penanggulangan bencana melibatkan kegiatan seperti pemetaan wilayah rawan bencana, pelatihan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur untuk mencegah atau mengurangi dampak bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2017). Upaya mitigasi ini harus melibatkan koordinasi antara BPBD dengan instansi pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta guna menciptakan kesiapsiagaan yang optimal. Selain itu, koordinasi antara BPBD dengan pihak-pihak terkait seperti TNI/Polri, dinas terkait, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sangat penting untuk memastikan proses evakuasi dan distribusi bantuan berjalan lancar. BPBD juga memanfaatkan teknologi dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk memetakan wilayah rawan bencana serta aplikasi pemantauan cuaca dan peringatan dini potensi bencana (Setyawan, 2015).

Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Tulungagung memfokuskan program edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tindakan preventif terhadap berbagai bencana alam. Program pelatihan kesiapsiagaan, seperti simulasi evakuasi dan pemahaman jalur evakuasi, dilakukan secara rutin agar masyarakat tangguh menghadapi situasi darurat (Daryanto, 2019). Di sisi lain, pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana seperti tanggul, saluran drainase, dan embung pengendali air menjadi langkah strategis dalam mengurangi risiko bencana, disertai upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan (Kementerian Sosial, 2018). Namun, BPBD masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga terlatih, serta keterbatasan anggaran untuk operasional dan pengadaan peralatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas memadai, dan kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang mendesak untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah (BNPB, 2017). Evaluasi kebijakan dan program penanggulangan bencana juga perlu dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan merumuskan strategi yang lebih baik di masa depan, sehingga BPBD dapat memberikan respons yang cepat, tepat, dan berkelanjutan terhadap setiap bencana yang terjadi (Setyawan, 2015).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif** untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kinerja dan peran BPBD Kabupaten Tulungagung dalam penanggulangan bencana, khususnya banjir. Informan penelitian terdiri dari Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan strategi, petugas lapangan BPBD yang terlibat langsung dalam evakuasi dan penanganan bencana, masyarakat terdampak banjir, serta perwakilan pemerintah daerah yang berkolaborasi dalam implementasi program mitigasi. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Tulungagung, yang menjadi fokus analisis terkait koordinasi dan tindakan penanggulangan bencana. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat.

Untuk memastikan keabsahan penelitian kualitatif, dilakukan beberapa uji. Uji keabsahan internal mencakup observasi mendalam, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan dengan anggota kelompok. Uji transferabilitas dilakukan dengan menyajikan temuan secara rinci, sistematis, dan dapat dipercaya agar dapat diterapkan di konteks lain. Uji dependabilitas mengevaluasi seluruh proses penelitian, sedangkan uji konfirmabilitas memastikan hasil penelitian benar-benar mencerminkan data dan proses penelitian tanpa bias. Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid, dapat dipercaya, dan memberikan kontribusi bagi strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung.

C. Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Tulungagung berperan penting dalam penanggulangan bencana banjir melalui perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program mitigasi. Kepala dan petugas BPBD aktif dalam merumuskan kebijakan, melakukan evakuasi, serta memantau kondisi lapangan, sementara masyarakat memberikan informasi terkait efektivitas penanganan bencana. Temuan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPBD, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta respons terhadap bencana. Efektivitas penanggulangan bencana dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan pelatihan bagi petugas maupun masyarakat. Analisis ini memberikan gambaran mengenai kekuatan, kendala, dan peluang perbaikan strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung.

Perencanaan (*Planning*) dalam Mitigasi Bencana

Perencanaan merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen bencana, dan BPBD Kabupaten Tulungagung telah menyusun berbagai dokumen seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontinjensi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan bencana berdasarkan jenisnya. Penyusunan dokumen ini melibatkan lintas sektor, termasuk dinas teknis, aparat desa, tokoh masyarakat, dan relawan kebencanaan, dengan pendekatan partisipatif meskipun keterbatasan anggaran dan sumber daya masih menjadi tantangan. SOP yang dibuat berfungsi sebagai panduan teknis saat situasi darurat, menekankan kecepatan respons, keselamatan personel, dan perlindungan bagi korban terdampak.

Pengorganisasian (*Organizing*) Sumber Daya dan Koordinasi

BPBD Tulungagung telah membentuk struktur organisasi yang jelas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas secara terkoordinasi, dengan setiap bidang memiliki peran dan tanggung jawab dari perencanaan hingga pelaksanaan lapangan. BPBD juga menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, dan komunitas relawan lokal, yang penting untuk mobilisasi personel, distribusi logistik, serta evakuasi dan pertolongan. Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya optimal, terutama terkait komunikasi waktu nyata dan pembagian peran saat tanggap darurat.

Pelaksanaan (*Actuating*) Program Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan atau *actuating* merupakan tahap implementasi rencana, di mana BPBD Tulungagung melaksanakan program pelatihan, simulasi evakuasi, dan edukasi kebencanaan bagi

masyarakat dan sekolah. Saat terjadi bencana, BPBD mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk evakuasi, pendataan korban, dan distribusi bantuan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat di lapangan cukup tinggi, terutama di wilayah rawan bencana, meskipun efektivitas respons masih terkendala oleh keterbatasan logistik dan infrastruktur komunikasi.

Pengawasan (*Controlling*) dan Evaluasi Program

Pengawasan oleh BPBD dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap program penanggulangan bencana, mencakup pelaksanaan mitigasi, keefektifan SOP, serta kesiapan sumber daya manusia dan logistik. Laporan kegiatan rutin disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan indikator keberhasilan seperti kecepatan respons, jumlah korban tertangani, dan partisipasi masyarakat. Namun, temuan menunjukkan bahwa evaluasi pascabencana masih kurang terdokumentasi dan tindak lanjut rekomendasi belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas manajemen bencana yang berkelanjutan.

Perencanaan (*Planning*) BPBD dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten

Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung, Robinson Parsaoran Nadeak, menjelaskan bahwa kebijakan dan SOP penanggulangan bencana disusun berdasarkan peraturan nasional serta pengalaman kejadian bencana sebelumnya, dengan perencanaan yang mencakup koordinasi pra-bencana, kesiapsiagaan masyarakat, serta penyiapan personel dan sumber daya untuk tanggap darurat dan pascabencana. BPBD juga menyusun rencana kontinjensi khusus untuk wilayah rawan banjir seperti Kecamatan Campurdarat dan Besuki dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam pemetaan risiko dan potensi korban.

Peran TNI, Polri, dan masyarakat sangat aktif dalam proses perencanaan, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran stakeholder terhadap pentingnya perencanaan, yang diatasi BPBD melalui komunikasi dan edukasi berkelanjutan. Dukungan pemerintah daerah melalui BAPPEDA turut memperkuat kebijakan dan penganggaran bersama BPBD, termasuk pelaksanaan program edukatif seperti Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Secara keseluruhan, perencanaan mitigasi bencana di Kabupaten Tulungagung telah dilakukan secara sistematis, kolaboratif, dan adaptif sesuai dengan regulasi nasional yang ditetapkan oleh BNPB.

Pengorganisasi (*Organizing*) BPBD Dalam Mengorganisir Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung

BPBD Tulungagung mengorganisir sumber daya manusia dan material melalui pembentukan Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops), yang bertugas mengatur operasi penanganan darurat serta menyiapkan personel dan kebutuhan material. Pengorganisasian dilakukan berdasarkan arahan pimpinan dan koordinasi tim di lapangan, sebagaimana dijelaskan oleh petugas Pusdalops, M. Noval Hamami. Koordinasi juga dijalin dengan instansi seperti Dinas Sosial, TNI, Polri, dan organisasi nonpemerintah, baik melalui surat resmi maupun komunikasi informal, untuk memastikan kelancaran penanganan bencana. Masyarakat dan relawan turut berperan dalam kegiatan mitigasi dan evakuasi, meskipun pengaturan relawan sering menjadi kendala di lapangan. Pemerintah daerah mendukung proses ini melalui pembentukan tim resmi serta penganggaran yang menjadi dasar administrasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pelaksanaan (*Actuating*) Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan rencana tanggap darurat di Kabupaten Tulungagung berjalan sesuai prosedur dengan dukungan berbagai pihak. Kepala BPBD menyatakan bahwa pelaksanaan penanganan bencana telah berjalan dengan baik, didukung oleh kegiatan simulasi yang meskipun tidak rutin, dilakukan bersamaan dengan sosialisasi dan pembentukan Desa Tangguh Bencana di sekolah-sekolah. Masyarakat terdampak, seperti Arif Suharmanto, menggambarkan bahwa saat banjir terjadi, penanganan darurat difokuskan pada pembersihan lumpur dan penyelamatan barang, tanpa evakuasi karena tidak ada korban jiwa. Selain itu, masyarakat turut dilibatkan dalam pelatihan kesiapsiagaan untuk meningkatkan kemampuan menghadapi bencana. Komunikasi informasi

darurat diatur melalui saluran resmi seperti WhatsApp Center dan surat ke kantor BPBD, yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan kondisi serta memperoleh bantuan dengan cepat.

Pengawasan (*Controlling*) Efektivitas Program Mitigasi di Kabupaten Tulungagung

BPBD Kabupaten Tulungagung melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program mitigasi bencana dengan menilai dampak serta respons masyarakat. Kepala BPBD menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan tingkat kepuasan masyarakat. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan SOP dan program mitigasi di masa mendatang, sementara perbandingan antara pelaksanaan dan rencana tanggap darurat menjadi acuan penilaian kinerja tim lapangan. Masyarakat menilai kinerja BPBD cukup efektif, namun mengharapkan peningkatan langkah preventif melalui pelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, hasil wawancara dan analisis menunjukkan bahwa manajemen BPBD Tulungagung dalam kerangka POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) telah berjalan cukup efektif dengan dukungan perencanaan berbasis regulasi, koordinasi lintas instansi, pelaksanaan tanggap darurat yang melibatkan masyarakat, serta pengawasan berkelanjutan meskipun masih dihadapkan pada kendala kesadaran stakeholder dan pengelolaan relawan yang belum optimal.

Interpretasi Hasil Penelitian

Perencanaan (*Planning*)

BPBD Kabupaten Tulungagung menyusun kebijakan dan prosedur penanggulangan bencana berdasarkan regulasi nasional dan arahan BNPB, dengan menyesuaikan pada karakteristik lokal seperti banjir dan tanah longsor di wilayah rawan. Rencana kontinjensi telah disusun untuk daerah berisiko tinggi seperti Kecamatan Campurdarat dan Besuki melalui kegiatan pemetaan risiko yang melibatkan berbagai stakeholder. Pemerintah daerah, melalui BAPPEDA, turut mendukung dari aspek kebijakan, penganggaran, dan program edukatif seperti Desa Tangguh Bencana (Destana) serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Namun, rendahnya kesadaran sebagian stakeholder terhadap pentingnya perencanaan masih menjadi kendala yang dihadapi BPBD, sehingga diperlukan komunikasi dan pendekatan partisipatif yang lebih konsisten. Secara keseluruhan, fungsi perencanaan di BPBD Tulungagung telah berjalan secara kolaboratif dan adaptif, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek kesadaran dan partisipasi lintas sektor.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam manajemen kebencanaan di Kabupaten Tulungagung berjalan dengan struktur yang jelas melalui pembentukan Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) sebagai pusat kendali utama saat bencana terjadi. BPBD telah menyiapkan personel serta menganggarkan kebutuhan logistik dan material darurat sejak pra-bencana, disertai koordinasi lintas instansi dengan TNI, Polri, Dinas Sosial, dan organisasi nonpemerintah melalui jalur formal maupun informal yang menunjukkan fleksibilitas dalam kemitraan. Meskipun demikian, pengorganisasian relawan dan masyarakat di lapangan masih menghadapi kendala berupa rendahnya disiplin dan kesadaran terhadap prosedur penanganan bencana. Pemerintah daerah turut mendukung dari sisi hukum, administratif, dan penganggaran dalam pembentukan satuan tugas kebencanaan. Secara keseluruhan, fungsi pengorganisasian di BPBD Tulungagung telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pelatihan dan koordinasi relawan agar respons lapangan lebih optimal.

Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan tanggap darurat di Kabupaten Tulungagung telah berjalan sesuai rencana dengan dukungan berbagai pihak, termasuk relawan dan masyarakat. BPBD menunjukkan responsivitas tinggi melalui penanganan cepat dan penyampaian informasi darurat menggunakan kanal resmi seperti WhatsApp Center dan surat dinas. Kegiatan simulasi kebencanaan dilaksanakan

secara insidental bersamaan dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) atau sosialisasi di sekolah, sementara partisipasi masyarakat terlihat melalui aksi mitigasi seperti penanaman pohon dan pembersihan saluran air, meskipun keterlibatan dalam pelatihan formal masih terbatas. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan saat kondisi darurat. Secara keseluruhan, fungsi pelaksanaan telah berjalan baik secara teknis, namun masih memerlukan penguatan melalui edukasi dan latihan sistematis untuk menumbuhkan budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan terhadap efektivitas program mitigasi bencana di Kabupaten Tulungagung dilakukan melalui evaluasi lapangan, monitoring dampak bencana, serta pengumpulan umpan balik dari masyarakat. BPBD menerapkan indikator kinerja seperti Indeks Risiko Bencana dan tingkat kepuasan masyarakat untuk menilai keberhasilan program, sementara evaluasi terhadap respons tim lapangan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan SOP, penyusunan kebijakan baru, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah daerah turut menilai efektivitas mitigasi melalui Indeks Ketahanan Daerah yang mencerminkan kemampuan wilayah dalam mengurangi risiko bencana. Meskipun sistem pengawasan internal telah berjalan cukup baik, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi masih terbatas dan bersifat informal, sehingga ke depan diperlukan pendekatan pengawasan yang lebih partisipatif agar masukan dari masyarakat dapat terintegrasi dalam kebijakan penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai *Analisis Manajemen BPBD dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Tulungagung* berdasarkan pendekatan fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling). Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan data hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta analisis terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi BPBD dalam penanggulangan bencana. Masing-masing kesimpulan disusun untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan, guna memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas manajemen kebencanaan di daerah tersebut. Berikut uraian kesimpulan dalam penelitian :

- 1) BPBD Kabupaten Tulungagung telah menyusun kebijakan dan prosedur operasional penanggulangan bencana berdasarkan regulasi nasional dan arahan BNPB. Perencanaan mencakup skenario darurat (rencana kontinjensi) untuk wilayah rawan seperti Kecamatan Campurdarat dan Besuki, serta pelibatan berbagai stakeholder dalam penyusunannya. Namun, tantangan utama masih terletak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif sebagian pihak dalam proses perencanaan, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi dan edukasi yang lebih intensif.
- 2) BPBD telah melakukan pengorganisasian sumber daya secara sistematis melalui pembentukan Pusdalops sebagai pusat kendali darurat dan pengalokasian logistik melalui mekanisme penganggaran. Koordinasi dilakukan dengan berbagai instansi terkait, baik secara formal maupun informal. Pemerintah daerah juga berperan dalam penganggaran dan pembentukan tim kebencanaan. Namun, pengelolaan terhadap relawan dan keterlibatan masyarakat di lapangan masih menghadapi kendala kedisiplinan dan keterpaduan, sehingga perlu penguatan pelatihan dan manajemen relawan.
- 3) Pelaksanaan rencana penanggulangan bencana telah berjalan baik dengan dukungan kolaboratif dari instansi pemerintah, relawan, dan masyarakat. Masyarakat terlibat dalam kegiatan mitigasi seperti penanaman pohon dan pembersihan saluran air. Informasi darurat disampaikan melalui kanal resmi seperti WA Center BPBD. Meski demikian, pelaksanaan simulasi bencana belum dilakukan secara berkala, dan masih bersifat insidental. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi dalam pelatihan dan pembentukan budaya siaga bencana.
- 4) Fungsi pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap dampak bencana, kinerja tim, dan respon masyarakat. BPBD menggunakan indikator seperti Indeks Risiko

Bencana dan tingkat kepuasan masyarakat sebagai acuan pengukuran efektivitas program. Evaluasi ini digunakan sebagai dasar revisi SOP dan kebijakan kebencanaan. Meski sistem pengawasan internal sudah berjalan baik, evaluasi secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung masih perlu ditingkatkan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan fungsi manajemen POAC dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung, terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan efektivitas kinerja BPBD. Pertama, aspek perencanaan perlu diperkuat melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi stakeholder lintas sektor agar kebijakan dan rencana kontinjensi lebih komprehensif dan aplikatif. Kedua, dalam pengorganisasian, perlu dilakukan pelatihan rutin bagi relawan dan masyarakat guna memperkuat koordinasi dan kedisiplinan saat tanggap darurat. Ketiga, pada tahap pelaksanaan, BPBD disarankan untuk menjadwalkan simulasi bencana secara berkala serta memperluas edukasi kesiapsiagaan di sekolah dan komunitas rawan bencana. Keempat, dalam pengawasan, perlu diterapkan sistem evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dan lembaga independen untuk memastikan transparansi serta keberlanjutan perbaikan kebijakan. Selain itu, dukungan anggaran dan pengembangan teknologi informasi juga penting untuk mempercepat proses respons dan pengambilan keputusan. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan BPBD Kabupaten Tulungagung dapat semakin tangguh, responsif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.

F. Referensi

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). *Pedoman Umum Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Laporan Tahunan Bencana di Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2015). *Pedoman Umum Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (2020). *Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana 2020*. Kabupaten Tulungagung: BPBD.
- Dharmawan, D. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daryanto, D. (2019). *Manajemen Penanggulangan Bencana: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fauzan, R., & Anwar, S. (2019). Manajemen Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Bandang oleh BPBD Kabupaten Pasaman. *JDKP – Jurnal Dinamika Kebijakan Publik*.
- Hasibuan, M. S. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (2007). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. New Jersey: Prentice Hall.
- Kettl, D. F. (2015). *The Politics of Disaster: Public Policy in the Wake of Hurricane Katrina*. New York: Routledge.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Panduan Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Luthans, F. (2011). *Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach*. New York: McGraw-Hill.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2019). *Human Resource Management: Essential Perspectives*. Boston: Cengage Learning.
- Mulyadi, A., & Kurniawan, F. (2017). *Pengelolaan SDM dalam Penanggulangan Bencana Alam*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Novianto, E. (2018). *Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Petugas Penanggulangan Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- O'Brien, G., & Korfmacher, K. (2013). *Evaluation of Disaster Response Systems: Lessons Learned from Global Experiences*. London: Routledge.
- Pereira, E. (2019). *Strategi Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UGM.

- Putra, R.A., & Kusuma, D. (2022). Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang. ResearchGates
- Rizki, D., & Hartono, T. (2020). Strategi BPBD dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro. JIAN – Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Sari, I. P., Wibowo, T., & Hartono, R. (2021). Analisis Peran BPBD dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bencana*, 5(2), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jmb.v5i2.12345>.
- Setyawan, I. (2015). *Manajemen Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Jaya.
- Sutrisno, B., & Hidayat, M. (2023). Koordinasi oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. JIA – Jurnal Ilmu Administrasi.
- Widodo, S. (2017). *Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Kinerja Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Wibowo, A. (2013). *Manajemen Kinerja: Teori, Prinsip, dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Wahid, S. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Publik*. Malang: UMM Press.
- Wijaya, A.P., & Setyowati, R. (2021). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Kota Solok, Sumatera Barat. JARVIC – Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik.